DPRD Sleman Kritik Penyaluran Bansos Jelang Pencoblosan

SLEMAN (KR) - Anggota DPRD Sleman Fraksi PKS, Hasto Karyantoro mengritik Pemkab Sleman yang kian gencar menyalurkan program bantuan sosial (bansos) menjelang hari pencoblosan Pilkada. Penyaluran bansos mendekati hari pencoblosan merupakan sebuah kejanggalan. Ada indikasi, bansos dimanfaatkan untuk kepentingan salah satu pasangan calon Pilkada.

"Ada indikasi untuk kepentingan paslon tertentu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya penyaluran program bansos diatur mendekati pencoblosan," tegas Hasto.

Berbagai kejanggalan ini terlihat dari munculnya surat undangan dari Dinas Pariwisata kepada seluruh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) selama tiga hari (27, 28, 29 November) di hotel berbintang. Acara tersebut membahas teknis pembagian dana hibah dari Kementerian Pariwisata sebesar Rp 68 miliar untuk pemulihan ekonomi wisata di Sleman. Dalam undangan tersebut, para Pokdarwis diminta hadir bergantian sesuai wilayah masing-masing.

Ketua Tim Pemenangan Paslon 02 Sri Muslimatun-Amin Purnama itu mengingatkan, jangan ada penyelewengan uang negara untuk kepentingan paslon yang di-backup kekuasaan. Undangan ini tidak lazim hanya untuk membahas teknis pembagian Dana Hibah. "Ini tidak lazim, dan tidak pernah dibahas di Dewan. Saya mempertanyakan kenapa penyalurannya dikebut mendekati hari pencoblosan?" kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah PKS Kabupaten Sleman itu.

Hal serupa dilontarkan Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Surana. Menurutnya selain dana hibah pariwisata, juga mendapat laporan ada indikasi penyelewengan bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK). Temuan ini didalami oleh kader NasDem yang menemukan bukti-bukti berupa leaflet, kalender, brosur dan video kampanye salah satu paslon di forum pertemuan PKH-BKK. Lokasi temuan di beberapa padukuhan di Kapanewon Ngaglik sepanjang bulan November.

"Ada sejumlah kejanggalan selama penyaluran bansos ini. Di antaranya penambahan data penerima bantuan, waktu penyaluran bantuan yang diatur jelang pemilihan, dan penyertaan simbol-simbol paslon tertentu," katanya.

Surana menyorot langkah Pemkab Sleman yang terkesan bermain-main dengan penyaluran bansos. "Sebagai anggota dewan saya menjalankan fungsi pengawasan. Wajar jika saya menaruh curiga ada indikasi penyelewengan berbagai bansos," tegasnya.

Ketua DPD NasDem Sleman itu mengingatkan Pemkab agar mencermati aturan penyaluran bantuan sosial selama masa Pilkada. Aturan ini dimuat dalam Pasal 71 Ayat (3) UU 10 2016 (UU perubahan kedua dari UU 1/2015 tentang Pilkada). Aturan tersebut melarang Kepala Daerah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan apapun yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Larangan ini berlaku enam bulan sebelum penetapan paslon.

"Aturannya sudah jelas melarang kepala daerah menyalurkan program yang berpihak pada salah satu paslon, bahkan selama 6 bulan sebelumnya," pungkas Wakil Ketua Tim Pemenangan 02 itu. **(Has)-f**

Disortir, Ribuan Surat Suara Pilkada Rusak

SLEMAN (KR) - Ribuan surat suara Pilkada Sleman 2020 dalam kondisi rusak saat proses sortir yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman. Kerusakan tersebut berupa bagian kertas terpotong hingga pencetakan yang tidak sempurna.

Menurut Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi, saat proses sortir dan pelipatan surat suara ditemukan 1.503 surat suara rusak. Hal tersebut diketahui saat proses sortir dan lipat surat suara. Kerusakan pada surat suara ini masih bisa dilakukan penukaran ke percetakan.

KPU Sleman optimis, banyaknya surat suara yang rusak tidak akan mempengaruhi jadwal tahapan Pilkada. "Cetak ulang dan melipat surat suara tidak memerlukan waktu yang lama. Dari skema untuk pengelolaan logistik sudah masuk dalam tata kelola dan semuanya aman dan siap kita sampaikan ke TPS sesuai jadwal," kata Trapsi, Minggu (29/11).

KPU menerima sebanyak 815.791 surat suara. Dalam proses sortir dan lipat, ditemukan 1.503 surat suara yang rusak. Kerusakan lain yang ditemukan pada surat suara misalnya warna yang tidak merah tapi lebih ke orange. Ada pula surat suara yang sobek dan dipotong tidak presisi.

Trapsi mengungkapkan, proses lipat dan sortir ditargetkan selesai dalam waktu 4 hari. Dalam hal ini, kurang lebih 153 orang terlibat dalam sortir dan lipat. Hingga saat ini, sudah ada 250.000 surat suara yang sudah disortir dan terlipat. "Sortir dan lipat sudah dimulai sejak Selasa (24/11)," tutupnya. **(Aha)-f**

Sleman Raih Bhumandala Award

SLEMAN (KR) - Pengembangan simpul jaringan data geospasial di Kabupaten Sleman terus dijalankan dan berprogres sesuai dengan target yang direncanakan dari sisi kebijakan, kelembagaan, standar, SDM maupun teknologi. Pengembangan tersebut berupa peningkatan jumlah keterlibatan OPD Daerah, jumlah dan kualitas data, hingga pemanfaatan data.

"Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Sleman untuk terus memajukan jaringan geospasial di daerahnya. Salah satu yang paling menonjol dari pengembangan simpul jaringan Kabupaten Sleman adalah pemanfaatan informasi geospasialnya. Pemanfaatan informasi geospasial mencakup pemanfaatan informasi geospasial dalam bidang tata ruang, kependudukan, kebencanaan hingga kesehatan," ungkap Bupati Sleman Sri Purnomo, Minggu (29/11), usai menerima Bhumandala Award di Jakarta, Jumat (27/11).

Menurut Bupati, Bhumandala Award sebagai ajang penilaian simpul jaringan tingkat nasional kembali memberikan penghargaan kepada Sleman sebagai peraih Bhumandala Kanaka (Medali Emas) dan Bhumandala Kencana (Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik) untuk katagori kabupaten.

"Sleman berhasil mempertahankan gelar Bhumandala Kanaka dan Bhumandala Kencana yang telah berhasil diraih pada tahun 2018. "Kami akan terus berkomitmen dalam mengembangkan simpul jaringan dengan kerja sama antar OPD sebagai satu kesatuan di Kabupaten Sleman," ujarnya. **(Has)-f**

KR-Istimewa

Bupati memperlihatkan Bhumandala Award.

PACU PICKUP KECEPATAN TINGGI

Seorang Bocah Tewaskan Pengendara Motor

BANTUL (KR) - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Parangtritis Dusun Tanjungkarang Patalan, Jetis Bantul, Sabtu (28/11). mobil pickup Mitsubhisi Nopol AB 8485 AT yang dikemudikan anak dibawah umur Fiazol (15) asal Madura menabrak motor Honda Beat AB 6304 RJ yang dikendarai Gino Naryo (55) warga Tanjungkarang Patalan Jetis Bantul.

Akibatnya Gino Naryo tewas dengan luka parah di bagian kepala. Kasus mengenaskan tersebut kini ditangani petugas Unit Kecelakaan Satlantas Polres Bantul.

Kanit Kecelakaan Satlantas Polres Bantul, Iptu Maryana SH, mengatakan tabrakan berawal ketika motor Honda Beat AB 6304 RJ melaju dari utara ke selatan dengan kecepatan sedang. Kemudian motor tersebut, hendak belok kanan atau ke barat. Di waktu bersamaan, dari arah sama melaju mobil pickup Mitsubhisi Nopol AB 8485 AT dengan kecepatan tinggi.

Karena jarak terlalu dekat, pengemudi pickup tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Sehingga mobil tersebut langsung menerjang motor di depannya sebelum terpelosok ke parit. "Pengendara motor terseret, jatuh terpental. Sedang mobil pickup menabrak pagar dan jatuh terbalik terjun ke parit," ujarnya. **(Roy)-f**

KR-Istimewa

Mobil pickup masuk parit di Jalan Parangtritis setelah mengalami kecelakaan.

DPRD KABUPATEN BANTUL

Mimbar Legislatif

Jl. Jend. Sudirman, Bejen, Bantul, Kecamatan Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Sistem Jaminan Kesehatan Perlu Diperbaiki

BANTUL (KR) - Jaminan perlindungan kesehatan dari pemerintah kepada warga masyarakat dinilai masih kurang optimal. Hal ini karena masih banyak hal yang harus diperbaiki, utamanya sistem sehingga tidak menimbulkan kesulitan di masyarakat.

KR-Rahajeng Pramesi

Drs Timbul Harjana

Anggota Komisi D DPRD Bantul, Drs Timbul Harjana kepada *KR*, Minggu (29/11), menuturkan kesehatan masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat. Meski demikian dari sisi pelayanan kesehatan baik berupa Jamkesda, BPJS dan aneka jaminan sosial lain masih terkesan belum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat secara optimal.

"Ambil contoh misalnya Jamkesda, plafon pembiayaan maksimal hanya Rp 5 juta. Sementara biaya pengobatan yang dikeluarkan masyarakat bisa lebih dari Rp 5 juta, utamanya bagi warga yang harus dilakukan tindakan operasi," jelas Anggota DPRD Bantul 3 periode ini.

Timbul menegaskan, idealnya plafon maksimal paling tidak Rp 10 juta sehingga jika ada tindakan operasi bisa mencukupi atau jika harus mengeluarkan uang tidak begitu besar. Hal lain yang menjadi permasalahan di lapangan yakni berkaitan nama 'alias' tidak dapat digunakan bagi pengurusan BPJS.

"Kepesertaan BPJS tidak boleh memakai alias. Padahal orang jaman dulu memakai nama misalnya Sumoharjo alias Pawiro. Di dalam KTP sudah tertulis demikian, namun BPJS tidak dapat sehingga hal seperti ini menghambat. Kalau ia harus mengganti nama berarti harus mengganti secara keseluruhan termasuk surat-surat berharga lain yang dimiliki," urai anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini.

Diungkapkan, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini banyak peserta BPJS utamanya dari PBI (Penerima Bantuan Iuran) sudah jauh berkurang. Harusnya pemerintah daerah mampu melakukan support utamanya bagi kemudahan akses Jamkes, apalagi jika sudah terintegrasi dengan BPJS.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul ini menegaskan sejak pandemi Covid-19, banyak warga yang mengikuti BPJS mandiri turun kelas. Bahkan mereka yang awalnya ikut akhirnya menunggak lama.

"Hal seperti ini hendaknya jadi pemikiran bersama pemerintah untuk dicarikan solusi karena bisa jadi warga yang demikian memang benar tidak dapat membayar karena terkena PHK, usahanya bangkrut dan faktor lain," tambahnya.

Di bagian lain, Timbul sebagai anggota Komisi D yang juga berkonsentrasi dalam hal pendidikan mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dalam mencarikan solusi mengatasi kejenuhan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Daring dengan menerapkan program Layanan Konsultasi Pelajaran (LKP).

"Saya mengapresiasi layanan ini, yakni siswa datang ke sekolah menemui guru tertentu dengan sistem penjadwalan dan dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Menurut saya program ini merupakan upaya terobosan dinas dalam meningkatkan efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama siswa BDR (Belajar Dari Rumah)," tutur Timbul.

Ditambahkan, untuk pelaksanaan sudah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kesan sudah masuk KBM tatap muka normal dan tidak terjadi gejolak baik dari orangtua maupun masyarakat. Dalam LKP siswa juga wajib menghindari kerumunan dan pulang tepat waktu.

"Program LKP ini sifatnya tidak wajib, sehingga yang tidak bersedia tidak mengapa karena PJJ selama pandemi tetap terus berjalan," urainya. **(Aje)-f**

PEMILIHAN LURAH CATURTUNGGAL

Latif Akan Perbanyak Wifi Gratis

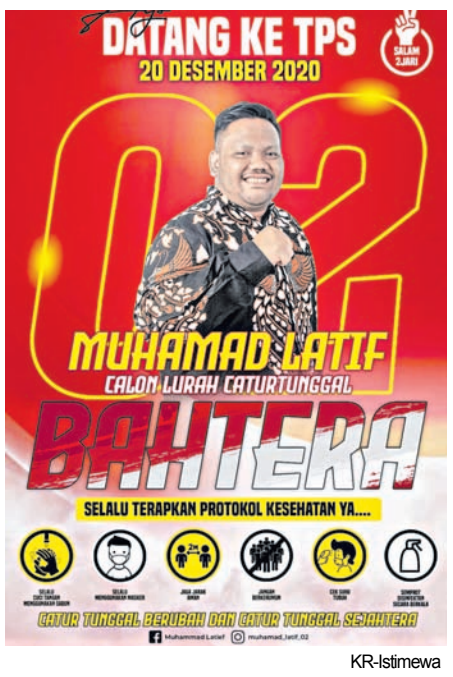

KR-Istimewa

Poster Muhamad Latif

DESA Caturtunggal, Kabupaten Sleman akan melaksanakan proses Pemilihan Lurah pada tanggal 20 Desember 2020. Peserta atau kandidat pemilihan Lurah Catur Tunggal adalah berjumlah 5 orang yang salah satu di antaranya Muhammad Latif sebagai calon termuda yang turut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut.

Calon dengan nomor urut 02 berprofesi sebagai pengusaha tersebut menyatakan bahwa majunya dirinya dalam pemilihan Lurah Catur Tunggal bukan karena kehendak ataupun ambisi pribadi, namun lebih didasarkan atas dorongan berbagai tokoh masyarakat yang menginginkan sebuah perubahan di Desa Caturtunggal, Sleman. Pengambilan keputusan tersebut, tidak serta merta dilakukan secara cepat, namun melalui proses pemikiran yang panjang.

Oleh karena itu, pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Majelis Muhyin Nufus Sleman ini memutuskan untuk maju dengan niat tulus membawa kebaikan serta manfaat dan maslahat untuk masyarakat Caturtunggal pada khususnya.

Dengan jargon "Bahtera" yang mengandung arti 'Catur Tunggal Berubah dan Catur Tunggal Sejahtera', Muhamad Latif langsung mengambil langkah serius dengan membuat visi/misi yang kuat dengan program kerja yang sarat muatan edukatif, jelas, transparan, terukur dan tepat sasaran untuk perubahan serta kesejahteraan masyarakat.

Visi/misi juga dapat di akses oleh masyarakat melalui akun media sosial meliputi: FB: Muhamad Latif, Instagram: muhamad_latif_02

Calon nomor urut 02 tersebut mengakui memiliki banyak kendala diawal, namun dengan kesungguhan hati serta tekad dan juga didukung oleh banyaknya lapisan masyarakat yang secara suka rela bergabung dalam tim sukses pemenangan, akhirnya Muhamad Latif menerima banyak simpati dan arus dukungan yang kian membesar dan tidak terbendung dari seluruh masyarakat yang menginginkan perubahan.

Tidak tanggung-tanggung, berbagai program telah banyak dilakukan bersama team di antaranya kegiatan sosial berupa penyebaran benih ikan, ziarah ke sesepuh / Lurah Caturtunggal, maupun dialog dengan berbagai tokoh, pelaku usaha hingga masyarakat luas telah rutin dilakukannya bersama team sukses.

Kegiatan sosial teranyar yang dilakukan adalah pemasangan WiFi Gratis di pedukuhan Gowok yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2020.

Pemasangan Wifi Gratis ini bertujuan sebagai sistem daring bagi anak-anak sekolah agar memudahkan proses belajar yang saat ini masih terkendala adanya pandemik.

Didukung tokoh-tokoh dan dibantu masyarakat serta disaksikan langsung oleh Muhamad Latif, proses pemasangan yang bertitik lokasi di Posko Pemenangan 02 berjalan baik dan telah dapat digunakan dengan baik.

Selanjutnya ia berharap ke depan bila terpilih menjadi Lurah Caturtunggal, akan menargetkan pengadaan titik Free Wifi di setiap pedukuhan yang ada secara merata dengan melibatkan kampus perguruan tinggi sebagai partner perkembangan Caturtunggal ke depannya. **(*)-f**